

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MUARO SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi
Negara*



OLEH :

FIRDAUS AGUSTA ARELA

NPM.190411021

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2024

ABSTRAK

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA**

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

FIRDAUS AGUSTA ARELA

NPM.190411021



Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha - usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur jalan. Infrastruktur merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk unsur responden Pemerintahan Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagai mana adanya. Hasil penelitian ini yaitu Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui tiga langkah strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum optimal.

Kata Kunci : Strategi, Pembangunan, Infrastruktur Desa



ABSTRACT

STRATEGY OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF MUARO SENTAJO VILLAGE, SENTAJO RAYA DISTRICT

KUANTAN SINGINGI DISTRICT

FIRDAUS AGUSTA ARELA

NPM.190411021

Development is a concept of social change that continuously leads to development and progress, requires comprehensive and continuous input and is an effort made by the government and society to achieve state goals. Road maintenance is defined as activities that include the regulation, guidance, construction and supervision of road infrastructure. Infrastructure is an absolute necessity in the road transportation system. This research was carried out on Jalan Tanah Genting, Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The aim of this research is to find out the Village Government's Strategy for Improving Infrastructure Development in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The problem formulation in the research is the Village Government's Strategy for Improving Infrastructure Development in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for respondent elements in the Muaro Sentajo Village Government, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency used a purposive sampling technique. The data analysis used is descriptive quantitative, which is a method used to analyze data by describing or describing the collected data as a whole about a situation or problem that occurs in the research object as it is. The results of this research are that in this case the implementation of infrastructure development goes through three strategic steps, namely planning, implementation and supervision. However, its implementation has not been optimal.

Keywords: Strategy, Development, Village Infrastructure



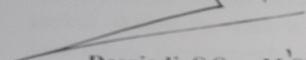
PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

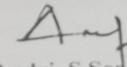
Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 01
Bulan : Agustus
Tahun : 2023

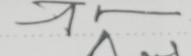
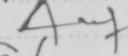
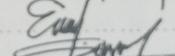
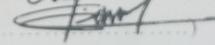
Tim Penguji

Ketua,

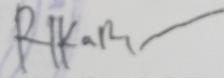

Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN.1022018302

Sekretaris,


Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN.1005108901

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|
| 1. Sahri Muharam, S.os.,M.si | (Pembimbing I) |  |
| 2. Alsar Andri, S.Sos.,M.Si | (Pembimbing II) |  |
| 3. Emilia Emharis, S.Sos.,M.si | (Anggota) |  |
| 4. Sarjan M, S.Sos.,M.Si | (Anggota) |  |

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN.1030058402



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan Shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul skripsi ini adalah Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

Ibu Dr.Ikrima Mailani,S.Pd.I.,M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.

Ibu Rika Ramadhanti, S.IP,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial serta selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi



bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini

Bapak Emilia Emharis, S.Sos,M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing.

Bapak Alsar Andri S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Melliofatria, S.Pd., M.Pd Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis.

Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

Orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk kuantan, Maret 2024

Penulis,



FIRDAUS AGUSTA ARELA

NPM. 19041102



Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR.....

i

DAFTAR ISI.....

ii

DAFTAR TABEL.....

iii

DAFTAR GAMBAR.....

iv

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.....

1

Rumusan Masalah.....

7

Tujuan Penelitian.....

7

Manfaat Penelitian.....

7

1.4.1 Aspek Teoritis.....

7

1.4.2 Aspek Praktek.....

7



BAB II LANDASAN TEORITIS

Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	7
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	10
2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	12
2.1.4 Teori/Konsep Strategi.....	15
2.1.5 Teori/Konsep Pembangunan Desa.....	17
Kerangka Pemikiran	19
Hipotesis.....	21
Defenisi Operasional	21
Operasional Variabel	22

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian	23
Populasi Dan Sampel	



23

3.2.1 Populasi.....

23

3.2.2 Sampel.....

23

Sumber Data

25

3.3.1 Data Primer.....

25

3.3.2 Data Sekunder.....

25

Fokus Penelitian

25

Metode Pengumpulan Data.....

26

3.5.1 Kuesioner.....

26

3.5.1 Observasi.....

26

3.5.3 Dokumentasi.....

26

Metode Analisis Data.....

26

Jadwal Penelitian.....

27



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Muaro Sentajo	28
4.1.1 Kondisi Wilayah.....	29
4.1.2 Keadaan Iklim.....	29
4.1.3 Demografi.....	29
4.1.4 Keadaan Sosial.....	31

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden	36
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	37
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Hasil dan Pembahasan Penelitian Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
5.2.1 Indikator Perencanaan Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	
5.2.1.1 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Musrengbangdes.....	



	40	
5.2.1.2 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Proses Penyusunan Musrengbangdes.....	41	
5.2.1.3 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Penetapan Hasil Musrengangdes.....	44	
5.2.2 Indikator Pelaksanaan Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	48	
5.2.2.1 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Waktu.....	49	
5.2.2.2 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Anggaran.....	51	
5.2.2.3 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Efektifitas.....	53	
5.2.3 Indikator Pengawasan Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi		56
5.2.2.1 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan.....	57	
5.2.2.2 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Konsistensi Aparat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur.....	59	



5.2.2.3 Sub Indikator Perencanaan Terhadap Pemeliharaan Mutu-Mutu Bangunan.....	
62	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	70
Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	
72	

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju ke arah perbaikan secara terus menerus dalam melaksanakan strategi infrastruktur. Keberhasilan



pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dalam proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi secara terus menerus dalam melaksanakan partisipasi. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi.

Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara komprehensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya karena hanya dengan pembangunan memungkinkan setiap bangsa dan negara dapat mencapai kesejahteraan. Pertimbangan itulah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari masyarakat desa. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu, pemerintah perlu mengetahui apa yang



dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya dan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Perencanaan program pembangunan di daerah desa diperlukan adanya suatu pemerintahan desa yang tangguh dan profesional dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap program yang ada di desa kepada masyarakat agar pembangunan di desa berjalan dengan efisien dan tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang dan secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di Indonesia, maka pemerintahan desa harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi dimaksudkan seperti mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat, partisipasi juga



dapat dimaksudkan untuk mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab. Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan/kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus.

Pembangunan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan



dan pengawasan infrastruktur jalan.

Infrastruktur merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Infrastruktur jalan di Indonesia merupakan prasarana transportasi darat yang dominan digunakan oleh angkutan barang dan juga angkutan penumpang. Jalan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Terbukti betapa besarnya peran jalan selama ini dalam mendukung mobilitas dan distribusi penumpang, barang dan jasa.

Secara strategis, kegiatan peningkatan pengelolaan jalan bertujuan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, mendukung pengembangan kawasan perbatasan serta membuka daerah terisolasi dan terpencil dengan cara mengurangi resiko ekonomi biaya tinggi akibat kesulitan akses dan mahal nya biaya transportasi dan angkutan. Dilihat dari beberapa aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi



dan mencairkan sekat budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bab III Ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

Ayat 2 mengatakan bahwa : “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Sedangkan Ayat 3 mengatakan bahwa : “Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan : a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan”.

Pada intinya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga ada peluang dan kebebasan bagi Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Di dalam menyalurkan pesan-pesan perencanaan pembangunan, kepala desa dan aparatur desa bertindak sebagai penyaring atau jembatan dalam pelaksanaan komunikasi. Pertama-tama kepala desa berkewajiban menyaring dan



menyerap pesan-pesan dan informasi pembangunan dari pemerintah. Pesan-pesan tersebut kemudian disesuaikan dengan keadaan masyarakat desanya. Setelah itu barulah kepala desa (komunikator) menyampaikan informasi dan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakatnya. Jadi dalam masyarakat desa, kepala desa mempunyai kedudukan penting sebagai penyalur pesan dan informasi pemerintah, dan menjadi penyalur terbawah pesan-pesan dan informasi perencanaan pembangunan. Masyarakat warga yang lain, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian untuk turut serta melibatkan diri dalam proses perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Pembagian kewenangan ini pada hakikatnya merupakan pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas dari negara kepada penyelenggara negara pada tingkat Pusat secara nasional dan Daerah secara regional dan lokal.

Berdasarkan berbagai uraian masalah tentang tidak tercapainya rencana infrastruktur, penulis kemudian tertarik mengadakan penelitian secara mendalam mengenai "Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi".



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, Menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan adapun Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Muaro Sentajo juga masih belum maksimal. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui tiga langkah strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini dilihat dari ketiga langkah strategi yang dilakukan terdapat dua tahapan saja yang berjalan optimal yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan pengawasan pembangunan infrastruktur masih kurang optimal terencana dalam pelaksanaan pembangunannya.

6.2 Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas maka penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

Pemerintahan desa, dalam pengawasan tentang pekerjaan yang keluar



dari standar yang ada selalu dilakukan koreksi kembali dengan baik maka diharapkan kepada kepala desa hendaknya dapat selalu mengoreksi atau mengevaluasi kembali setiap pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan para pegawai bisa berupa rapat evaluasi kerja yang diadakan per periode tergantung kebutuhan yang ada.

Pemerintahan desa lebih bersikap adil dan bijaksana dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa muaro sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur yang telah ada di desa ini terus dapat dijalankan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adamy Marbawi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh. Unimal Pres.

Anggra Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Edison, dkk. 2016. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.

Hasibuan, S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Kadarisman, 2012. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT.Gravindo Persada

Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moekijat,2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhoseumawe: Unimal pres

Mujanah, Siti, 2019. *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media

Simarora Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: SIE YKPN

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung

Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta-14240.

Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo

Jurnal



Muliati, 2019, Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Meraja Journal*. Vol.2 No.1

Isvandiari Any, Faudah L, 2017, Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PG. Meritjan Kediri. *Jurnal JIBEKA*. Volume 11 No. 1

Undang-Undang

Undang-undang Cipta Kerja Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi.

